

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan satu dari berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Salah satu negara yang masih menghadapi kemiskinan yaitu di Indonesia. Kemiskinan yang telah berkembang terus menerus dapat diartikan karena adanya ketidakmampuan seseorang/individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Masyarakat yang tergolong miskin cenderung memiliki pendapatan dibawah standar UMR, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat penting, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin sangat jauh dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju, sehingga perlu adanya kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat menanggulangi angka kemiskinan tersebut.

Jumlah angka kemiskinan di Indonesia menurut (BPS, 2021) jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Oleh karena itu, tidak semua daerah berkembang dapat dikatakan maju secara keseluruhan. Peningkatan jumlah

penduduk yang begitu pesat juga menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit. Banyaknya masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan membuat penghasilan setiap harinya tak menentu. Itulah sebab mengapa angka kemiskinan tak kunjung menurun dan kemiskinan selalu menjadi permasalahan yang tiada hentinya.

Masalah kemiskinan juga erat kaitanya dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindak kekerasan dan kejahatan. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun program jaringan pengaman sosial untuk membantu secara langsung masalah masyarakat yang membutuhkan. Misalnya saja program perlindungan sosial adalah jasa untuk memelihara pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap uang sekolah. Karena perlindungan sosial sendiri merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Suharto (2008) dalam Bappenas (2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Oleh sebab itu, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial telah berupaya secara terus menerus membantu masyarakat agar kehidupannya lebih sejahtera. Melalui suatu program yang dibuat oleh pemerintah, harapannya beban masyarakat dapat berkurang. Banyaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan program penanggulangan kemiskinan yaitu mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk rakyat miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Menurut Perpres No 15 Tahun 2010 (pasal 1, ayat 2), Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Namun, hingga sampai saat ini tetap saja masalah kemiskinan tidak juga dapat menurun. Hal tersebut, karena kemiskinan dapat menurun secara bertahap apabila program dari pemerintah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Demikian dari sekian banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Namun hingga saat ini, bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan

program ini dapat mengurangi kemiskinan di negara kita yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program perlindungan sosial yang menasar keluarga sangat miskin dengan harapan keluarga tersebut sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depan generasi yang lebih baik. Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak juli tahun 2007. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan yang semakin meningkat mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS 2016).

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2018 cakupan kepesertaan PKH sudah mencapai 10 juta keluarga miskin (KM) di 514 kabupaten/kota dan 6.542 kecamatan dan pada tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 15 juta keluarga miskin di 34 provinsi. Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan, pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 5.981.528 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 7,6 Triliun, Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,3 Triliun, tahun 2018 sebanyak 10.000.232 Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun tahun 2019 sebanyak 9.841.270

Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,7 Triliun, tahun 2020 sebanyak 10.000.000 Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun (<https://pkh.kemsos.go.id>).

Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah itu data tersebut mengalami pemilahan data di database Kementerian Sosial untuk menentukan tingkat kesejahteraan dari warga di daerah tertentu yang dirangkum dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kementerian Sosial. Dari data tersebut kemudian ditentukan apakah seseorang atau keluarga tersebut layak atau tidak, dengan memperhatikan komponen dan kategori yang ada dalam keluarga tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun.

Tabel 1.1
Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun

NO	KATEGORI	JUMLAH BANTUAN
1	Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000,-
2	Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun	Rp. 3.000.000,-
3	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000,-
4	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000,-
5	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,-
6	Kategori Penyandang Disabilitas berat	Rp. 2.400.000,-
7	Kategori Lanjut Usia	Rp. 2.400.000,-

(sumber : <https://pkh.kemsos.go.id>)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi kualifikasi tertentu (kronis, rentan terhadap guncangan ekonomi) dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat mengubah perilaku individu maupun masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perlindungan sosial yang berupaya memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera.

Suharto (2014: 2) dalam Ngutra (2017) menjelaskan kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social; (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan social; (3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya.

Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah. Pertama Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi.

Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar

masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

Kedua pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya.

Pendidikan di sini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk

mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Ketiga kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Pada tahun 2014 pemerintah melanjutkan program ini di beberapa kabupaten/kota salah satunya di kabupaten Kupang dengan sasaran kecamatan-kecamatan yang belum menerima bantuan tersebut salah satunya kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Kecamatan Kupang tengah memiliki 1 kelurahan dan 7 desa yaitu Kelurahan Tarus, Desa Mata Air, Desa Penfui Timur, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Noelbaki, Desa Tanah Merah, dan Desa Oebelo. Salah satu desa yang penduduknya mendapatkan bantuan PKH di kecamatan Kupang Tengah yaitu Desa Mata Air.

Berikut ini diuraikan penerima bantuan PKH Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sejak tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerima Dana Bantuan PKH di Desa Mata Air
2018-2022

No	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
1	2018	175
2	2019	175
3	2020	164
4	2021	157
5	2022	174

Sumber : Desa Mata Air 2022

Berdasarkan tabel di atas jumlah penerima bantuan PKH untuk tahun anggaran 2018-2020 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang selalu bervariasi jumlahnya dari tahun ketahun dikarenakan banyak data baru yang menambah jumlah penerima dan juga banyak juga Keluarga Penerima Manfaat yang telah keluar dari PKH karena sudah sejahtera atau karena tidak memiliki komponen sebagai syarat kepesertaan PKH. Selama tahun 2018-2022 tercatat total penerima bantuan PKH terbanyak terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 175 kepala keluarga yang terdata layak sesuai syarat-syarat kepesertaan PKH. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten kupang Khususnya di desa Mata Air masih cukup rendah dikarenakan banyaknya penduduk miskin serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mendalaminya lebih lanjut dengan mengambil judul “**Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih memfokuskan Kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan rumusan masalah dalam Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi dari keluarga penerima Program PKH di Desa Mata Air?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2021?
3. Bagaimana Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, peneliti mempunyai tujuan Yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kondisi dari keluarga penerima Program PKH di Desa Mata Air.
2. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di tahun 2020-2021 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang setelah adanya program PKH di tahun 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas. Maka, dapat peneliti paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dari segi teoretis, penelitian ini termasuk dalam rangka Pengembangan ilmu pengetahuan yang utamanya menyangkut tentang Ilmu politik, dan secara khusus menyangkut tentang kebijakan publik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan juga mampu memberi Sumbangsi ilmu pengetahuan terkait kebijakan publik kepada UNWIRA Kupang dan lebih khusus kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Pada segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan berpikir bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan banyak Evaluasi dan optimalisasi di jajaran Kementerian-Kementerian terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan program- program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bagi pengamat politik atau ahli politik dan kebijakan Publik, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa Dan wacana mengenai bagaimana program- program penanggulangan Kemiskinan yang tersistematis dan terencana dengan baik. Dengan Implikasi akhir, nantinya juga berdampak terhadap Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang secara khusus, serta juga Seluruh masyarakat di Indonesia secara umum.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah di dalam memahami penelitian ini. Peneliti perlu Untuk memberikan batasan sebagai berikut:

1. Program pemerintah Pusat yang secara teknis dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Ke Mensos RI dengan nama program yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. Disini, esensi kesejahteraan Sangatlah luas dan mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, Politik, dsb. Akan tetapi, dalam penelitian ini kesejahteraan yang akan Diukur adalah kesejahteraan di bidang sosial.
3. Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kupang Tengah yang terdiri atas 7 Desa dan 1 Kelurahan dan salah satunya adalah Desa Mata Air yang menjadi target tempat dilakukannya penelitian di tahun 2020-2021.